

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MEKANISME PEMUNGUTAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
PELALAWAN**

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas
Akademik dan Memperoleh Gelar Ahli Madya*

OLEH

ALFYN MAHENDRA NAWAWI
NIM 02270613611



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025



LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

Nama : Alfyn Mahendra Nawawi
Nim : 02270613611
Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan

**DIKETAHUI OLEH
 PEMBIMBING**

Yusrialis, SE, M.Si
NIP. 197908102009121004

MENGETAHUI

Plt. Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Kejua Program Studi
D3 Adminitrasi Perpajakan



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 197404122006042002

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : ALFYN MAHENDRA NAWAWI
NIM : 02270613611
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI
JUDUL : MEKANISME PEMUNGUTAN DAN
 KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 KABUPATEN PELALAWAN
TANGGAL UJIAN : 26 JUNI 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP. 19790101200710 1 003

Sekretaris

Saipul Alsukri, M.Si

NIP. 19860108201903 1 007

Penguji I

Hesty Wulandari, M.Phil., MSc., Ak

NIP. 19821207201101 2 002

Penguji II

Ari Nur Wahidah, SE, MM

NIP. 19780105200710 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Alfyn Mahendra Nawawi
Nim : 02270613611
Tahun Angkatan : 2022
Semester : VI (Enam)
Program Studi : DIII Administrasi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pemungutan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Pelalawan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Juli 2025

Yang membuat pernyataan
Mahasiswa



Alfyn Mahendra Nawawi

Nim. 02270613611

1. Harap dihindari menggunakan kata-kata yang mengandung plagiarisme atau seluruhnya atau sebagian dari karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PELALAWAN

Oleh:

ALFYN MAHENDRA NAWAWI
NIM. 02270613611

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk menganalisis mekanisme pemungutan Pajak Reklame serta mengkaji kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan. Pajak Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berperan penting dalam struktur PAD, yang setiap tahunnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, didukung dengan analisis data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka untuk mengukur tingkat realisasi dan kontribusi. Objek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan dari Tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi kinerja yang perlu dicermati.

Kata Kunci : Mekanisme Pemungutan, Kontribusi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT
COLLECTION MECHANISM AND CONTRIBUTION OF ADVERTISING TAX TO LOCAL OWN-SOURCE REVENUE (PAD) IN PELALAWAN REGENCY

By :
ALFYN MAHENDRA NAWAWI
NIM. 02270613611

The main objective of this study is to analyze the collection mechanism of the Advertising Tax and examine its contribution to the Local Own-Source Revenue (PAD) of Pelalawan Regency. Advertising Tax is one of the local taxes that plays a significant role in the structure of PAD, with the expectation of providing substantial contributions annually. This research adopts a qualitative approach, supported by quantitative data analysis presented in numerical form to measure the realization level and contribution rate. The object of the study is the Regional Revenue Agency (Badan Pendapatan Daerah) of Pelalawan Regency. Based on the collected data, the realization of Advertising Tax revenue in Pelalawan Regency from 2022 to 2024 shows fluctuating performance that warrants further attention.

Keywords: Collection Mechanism, Contribution, Advertising Tax, Local Own-Source Revenue (PAD)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Berkat kasih sayang dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Mekanisme Pemungutan dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan". Tugas ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Semoga kita senantiasa dapat meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menyadari bahwa tersusunnya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, doa, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda Jhon Hendri dan Ibunda Arjuna tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan, cinta, serta pengorbanan yang tak ternilai sejak awal hingga akhir perjalanan studi ini. Segala jerih payah dan ketulusan hati mereka adalah kekuatan utama yang mengantarkan penulis hingga pada titik ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan kasih sayang mereka dengan pahala yang berlipat ganda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE.,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos.,M.Si., Dr. Mahmuzar, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A. selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Yusrialis, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak/Ibu staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya untuk dosen program studi D-III administrasi perpajakan yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Bapak/Ibu staff di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan informasi dan data terkait penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 Prodi DIII Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang turut andil dalam penulisan Tugas Akhir ini.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil dalam memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga segala bantuan, dukungan serta doa yang telah diberikan menjadi amal baik mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat membutuhkan kritik, masukan dan saran yang sifatnya membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas Akhir ini berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 28 Mei 2025
Penulis

Alfyn Mahendra Nawawi
NIM. 02270613611

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.5.2 Waktu Penelitian.....	9
1.5.3 Jenis Data.....	9
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	9
1.6 Analisis Data.....	10
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	12
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.....	12
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.....	13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	
Kabupaten Pelalawan.....	14
2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.....	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK.....	31
3.1 Tinjauan Teori.....	31
3.1.1 Pengertian Pajak.....	31
3.1.2 Fungsi Pajak.....	32
3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	33
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	34
3.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	36
3.1.6 Pajak Reklame.....	39
3.1.6.1 Pengertian Pajak Reklame.....	39
3.1.6.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	39
3.1.6.3 Objek Pajak Reklame.....	40
3.1.6.4 Subjek Pajak Reklame.....	41
3.1.6.5 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak Reklame.....	42
3.1.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	44
3.1.8 Pengertian Kontribusi.....	44
3.1.9 Pandangan Islam Terhadap Pajak.....	45
3.2 Tinjauan Praktek.....	47
3.2.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Dan SOP.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Kontribusi Pajak Reklame Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan.....	55
3.2.3 Upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Reklame.....	57
3.3 Perbandingan tinjauan teori dan praktik.....	59
BAB IV PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSAKA.....	64
LAMPIRAN.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022-2024.....	3
Tabel 1.2	Target Dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022-2024.....	4
Tabel 3.1	Jumlah Objek Pajak Dan Wajib Pajak Reklame Kabupaten Pelalawan Tahun 2022-2024.....	49
Tabel 3.2	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2022-2024	56
Tabel 3.3	Perbandingan Teori dan Praktek.....	59

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.....	14
Gambar 3.2	Flowchart Prosedur Pemungutan Pajak Reklame	54



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2022-2024	3
Grafik 1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten pelalawan Tahun 2022-2024	5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadi elemen kunci dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, penyediaan layanan publik yang optimal, serta penguatan pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah daerah membutuhkan sumber daya keuangan yang cukup. Dalam kerangka otonomi daerah yang terus diperluas, kemandirian keuangan menjadi indikator utama keberhasilan pemerintahan daerah. Salah satu komponen penting dalam upaya mewujudkan kemandirian tersebut adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari potensi ekonomi dan kewenangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah.

Dari sekian banyak jenis PAD, Pajak Reklame memegang peranan penting karena memiliki potensi pendapatan yang cukup besar. Pajak ini dikenakan atas kegiatan pemasangan reklame, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, yang tersebar di berbagai titik strategis. Dengan berkembangnya sektor bisnis, periklanan, serta penyebaran informasi di ruang publik, pemanfaatan reklame menjadi semakin luas dan bervariasi. Kondisi ini secara otomatis memperluas objek pajak yang dapat digarap, dan bila dikelola dengan baik, berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah.

Meski demikian, pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sering menghadapi berbagai hambatan. Mulai dari belum terdatanya seluruh objek pajak, kesulitan dalam menetapkan nilai jual objek pajak secara tepat, hingga rendahnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran serta kepatuhan dari para wajib pajak. Kompleksitas tersebut menuntut keberadaan sistem pemungutan yang akuntabel, efisien, dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi serta perkembangan teknologi.

Peraturan perpajakan daerah terus diperbarui guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan menyesuaikan dengan kebijakan fiskal nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi pijakan hukum terbaru yang sangat penting. Undang-undang ini tidak hanya mengatur secara menyeluruh mengenai jenis pajak dan retribusi daerah, tetapi juga bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab, serta memberi keleluasaan bagi daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri.

Sebagai turunan dari UU HKPD, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PP ini menjadi pedoman teknis yang menjabarkan berbagai aspek pelaksanaan perpajakan daerah, termasuk ketentuan mengenai Pajak Reklame. Di dalamnya tercantum rincian mengenai dasar pengenaan, batas maksimal tarif, prosedur pemungutan, hingga sanksi administratif, yang menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan peraturan turunannya.

Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini merupakan adaptasi dari ketentuan UU HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 yang

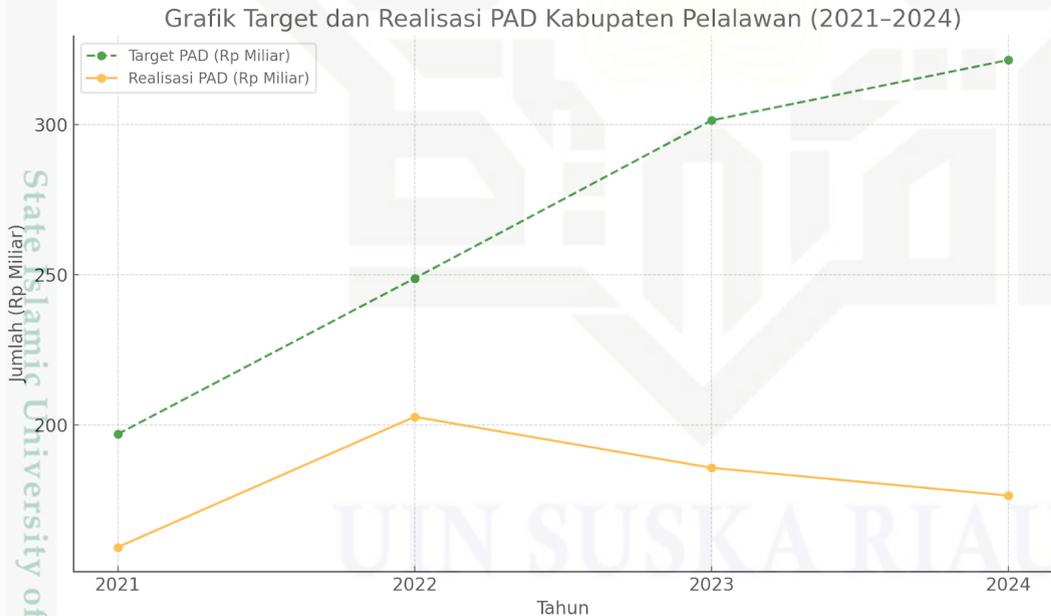
disesuaikan dengan karakteristik serta potensi lokal Kabupaten Pelalawan. Hadirnya Perda ini berperan langsung dalam menentukan sistem pemungutan Pajak Reklame di daerah, sekaligus memengaruhi estimasi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022-2024

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2021	196.970.441.464,00	159.338.587.812,00	80.91%
2	2022	248.871.591.795,00	202.746.201.246,00	81.47%
3	2023	301.457.515.202,00	185.762.566.837,00	61.62%
5	2024	321.570.908.000,00	176.506.638.986,00	54.89%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Grafik 1.1



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan tabel 1.1 dan Grafik 1.1, terlihat bahwa realisasi PAD Kabupaten Pelalawan dari tahun 2022 hingga 2024 tidak memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebesar Rp.196.970.441.464, dengan realisasi sebesar Rp.159.338.587.812, sehingga persentase realisasinya mencapai 80,91%. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024 terjadi tren penurunan persentase realisasi PAD setiap tahunnya. Pada tahun 2022, realisasi PAD tercatat sebesar Rp. 202.746.201.246 , sementara targetnya adalah Rp.248.871.591.795. Di tahun 2023, realisasi PAD mencapai Rp.185.762.566.837 , dengan target sebesar Rp.301.457.515.202 . Dan pada tahun 2024 realisasi PAD adalah Rp.176.506.638.986, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.321.570.908.000. Penurunan Persentase realisasi secara berturut-turut dari tahun 2022 hingga 2024 ini mengindikasikan adanya tantangan yang semakin besar dan sistematis dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pelalawan, yang memerlukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebab dan strategi pemungutan yang diterapkan.

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Presentasi (%)
2021	1.657.500.000	1.422.473.404	85%
2022	1.755.000.000	1.337.785.743	75%
2023	1.803.000.000	1.320.230.171	74%
2024	1.878.000.000	1.821.048.738	95%

Sumber : Bapenda Kabupaten Pelalawan 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafik 1.2

Grafik Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Pelalawan (2021-2024)



Pada tabel diatas terlihat di tahun 2021 Target penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebesar Rp.1.657.500.000, dan berhasil direalisasikan sebesar Rp.1.422.473.404, dengan tingkat pencapaian sebesar 85%. Dan pada tahun 2022 target penerimaan pajak reklame di tetapkan sebesar 1.755.000.000, namun terealisasikan hanya sebesar 1.337.785.743 dengan presentase 75% Pada tahun 2023 target mengalami kenaikan sebesar 1.803.000.000 namun hanya terealisasikan hanya 1.320.230.171 dengan peresentase 74% yang lebih rendah dari tahun sebelum nya. Dan pada tahun 2024 target ditingkatkan menjadi 1.878.000.000 namun realisasinya hampir mencapai target yaitu sebesar 1.821.048.738 dengan presentase 95%Ini menunjukkan Pajak Reklame mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya atau di sebut fluktuasi sebagaimana tabel 1.2 menunjuk bahwa penerimaan pajak reklame di setiap tahun nya belum efektif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendalaman analisis terhadap fenomena ini menjadi sangat penting. Keberhasilan mekanisme pemungutan Pajak Reklame sangat ditentukan oleh pemahaman menyeluruh mengenai tahapan identifikasi objek pajak, pendataan, penetapan nilai pajak, hingga proses penagihannya. Berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran dari pihak wajib pajak, keterbatasan informasi yang tersedia, hingga hambatan administratif dapat berdampak langsung terhadap pencapaian target penerimaan. Oleh karena itu, kajian terhadap sistem pemungutan yang sedang diterapkan diperlukan untuk menemukan titik-titik kelemahan yang masih ada, sehingga potensi penerimaan dari Pajak Reklame dapat dimaksimalkan.

Mengetahui sejauh mana peran Pajak Reklame dalam keseluruhan Pendapatan Asli Daerah juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. Peningkatan penerimaan dari sektor ini berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap jenis pendapatan daerah lainnya dan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, studi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem pemungutan berjalan, tetapi juga menelaah pentingnya Pajak Reklame dalam mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Pelalawan, sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam regulasi terbaru.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk memahami secara komprehensif mekanisme pemungutan dan kontribusi dari setiap jenis pajak daerah, termasuk Pajak Reklame. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengevaluasi efektivitas mekanisme pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Pelalawan, menganalisis kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengkaji strategi dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan penerimaan dari sektor tersebut. Penelitian ini mengusung judul: **“Mekanisme Pemungutan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Reklame di BAPENDA Kabupaten Pelalawan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Reklame?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Reklame di Bapenda Kabupaten Pelalawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Reklame.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan dan informasi tentang mekanisme pemungutan serta kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pelalawan, serta menerapkan teori dan praktek sebagai salah satu syarat dalam penulisan tugas akhir.

2. Manfaat bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam pengelolaan Pajak Reklame, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa yang tertarik pada topik serupa.

3. Manfaat bagi Pembaca

Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman pembaca mengenai pentingnya Pajak Reklame sebagai salah satu sumber PAD, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian akademik maupun praktis di masa mendatang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pelalawan yang berlokasi di Jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Harun, Pangkalan Kerinci Barat, Kec.Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan selama periode bulan Februari hingga April tahun 2025.

1.5.3 Jenis Data

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pelalawan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti melalui buku, dokumen, serta literatur lainnya yang relevan. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data primer dalam menunjang proses penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan proses yang berkaitan dengan mekanisme pemungutan dan kontribusi Pajak Reklame di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, sebagai lokasi pelaksanaan penelitian ini.

- b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan di Badan Pendapatan Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Pelalawan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai Mekanisme pemungutan Pajak Reklame dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan serta menelaah dokumen, arsip, dan catatan resmi dari instansi terkait. Dokumen yang dikaji merupakan data pendukung yang berhubungan dengan Pajak Reklame dan digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

1.6 Analisis Data

Adapun analisis data penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data yang sudah ada dengan teori yang mendukung, kemudian melakukan kesimpulan dan mengemukakan saran.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Tugas akhir ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini, penulis menjelaskan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, struktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, visi dan misi, serta tugas-tugas yang ada di kantor tersebut.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini berisi penjelasan teori yang mendukung penelitian serta uraian mengenai praktik yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah serta diperjelas melalui pasal 46 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten pelalawan Nomor 10 tahun 2016 Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pelalawan BPKAD merupakan badan daerah dengan type A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Selanjutnya berdasarkan peraturan Bupati Pelalawan Nomor 78 Tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan menghormati jasa-jasa pahlawannya. pemahaman dari pernyataan Proklamator Bangsa kita ini dapat dikaitkan untuk skala yang lebih kecil kalimat tersebut pendek tapi memiliki makna yang berdampak luar biasa bila dapat dihadirkan dalam skala yang terkecil sekecilpun. Sebagai pelaku sejarah, tidak jarang kita



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat antara pelaku sejarah melakukan koreksi terhadap pelaku sejarah lain maka tidaklah mengherankan bagi Negara kita jika sering menemukan penyimpangan fakta dalam sejarah hal inilah yang mengilhami kita bahwa kita harus memahami sejarah, karena dalam menghargai dan menguasai sebagai modal kedepan dalam dalam menentukan arah kedepan arah pergerakan Dinas Pendapatan.

Dalam meningkatkan peran dinas, maka usaha daerah penyempurnaan organisasi setiap tahunnya terus diupayakan agar bisa memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak), dengan ini kami mengharapkan akan dibentuknya kantor Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

2.2 Visi dan Misi

1. Visi

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman. (Maju SDM), Mewujudkan kemakmuran ekonomi di perkotaan dan pedesaan yang mandiri dan berdaya saing (Maju Ekonomi).
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, lengkap, dan berkelanjutan (Maju Infrastruktur).
3. Mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata dan Budaya).
4. Mewujudkan Tata kelola dan layanan pemerintahan yang humanis (Good Public Services) berbasis data dan teknologi informasi (Maju Pemerintahan).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Mandiri dan Berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan pariwisata daerah melalui pemajuan budaya melayu.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Adapun Uraian Tugas (job description) Bagian/Unit kerja menurut peraturan walikota Pangkalan Kerinci Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pangkalan Kerinci, sebagai berikut :

1. Kepala Badan
 - 1). Melakukan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Perda No. 09 Tahun 2012
 - 2). “Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan kewenangannya.
 - 3) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - a) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya.
 - b) Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c) Perumusan, pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
 - d) Perumusan, pembinaan dan pengkordinasian pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f) Perumusan dan penyelenggaraan urusan pantau usaha badan sesuai dengan kewenangannya.
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

1). Merencanakan, Melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas umum, kepegawaian perlengkapan, keuangan, program hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.

2). Sekretariat dibawah kedudukan dan bertanggung jawab kepada daerah.

a) Sekretariat terdiri dari :

I. Sub Bagian Program

II. Sub Bagian Umum

III. Sub Bagian Keuangan

3). Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a) Sub Bagian Program memiliki Tugas :

I. Menyusun Rencana dan Program kerja operasional kegiatan Sub bagian Program Berdasarkan Program kerja Sekretariat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- II. Mengkoordinasikan kegiatan dan Melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Dinas.
- b) Sub Bagian dan Kepegawaian Mempunyai Tugas :
 - I. Menyusun Rencana dan Program kerja operasional Sub bagian umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja sekretariat.
 - II. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
 - III. Melaksanakan tertib administrasi naskah Dinas.
- c) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - I. Menyusun rencana dan program kerja oprasional sub bagian Keuangan berdasarkan program kerja sekretariat.
 - II. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk Dokumen dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
 - III. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.
3. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai Tugas :
 - 1). Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas bidang pendaftaran dan perhitungan diantaranya melaksanakan pendapatan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2). Kepala Bidang Pendaftaran dan Perhitungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas :

1. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan terdiri atas :

- a) Seksi Pendaftaran dan Pendapatan
- b) Seksi Perhitungan
- c) Seksi Penetapan

3). Setiap seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang.

1. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana dan program Kerja operasional Seksi Pendaftaran dan pendataan berdasarkan program kerja bidang Pendaftaran dan Perhitungan.
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pendaftaran dan pendataan.
- c) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pendaftaran dan pendataan sebagai acuan / pedoman penyusunan rencana kegiatan.

4. Bidang Pendaftaran dan Perhitungan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas :

- 1). Memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pendaftaran dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhitungan diantaranya melaksanakan pendapatan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang ada.

2). Kepala Bidang Pendaftaran dan perhitungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3). Kepala Bidang Pendaftaran dan perhitungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5. Bidang bagi Hasil dan Dana Perimbangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas :

1). Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2). Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

b) Penyusunan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum.

c) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- d) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e) Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- f) pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket, informasi, pemberi informasi terkait pelayanan pajak daerah.
- g) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.
- i) pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
- j) Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan.
- k) Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pemimpin, tamu pemimpin, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- l) Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional suatu badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.
- n) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai.
- o) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- p) Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- q) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- r) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sub bagian Keuangan
 - 1). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2). Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.
 - c) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - d) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
 - e) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Bayar (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Bayar (SPM).
 - f) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dengan ketentuan yang berlaku.
- h) pelaksanaan akuntansi badan.
- i) Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- j) pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran.
- k) pelaksanaan Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- l) Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- m) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Sub Bagian Program

- 1). Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2). Sub Bagian Program dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi nya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b) Penyusunan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
- c) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang terhubung dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, renstra, renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- f) Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan
- g) Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa
- h) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bidang Pajak Daerah I

- 1). Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- 2). Bidang pajak daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Pengkordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB, dan PPJ.
 - c) Pengkordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.
 - d) Pengkordinasian dan pelaksanaan pengelola daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran di pendataan.
 - e) Pengkoordinasian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Bidang Pajak Daerah II

- 1). Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak sarang BURUNG Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.
- 2). Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - 3). Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 4). Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
 - 5). Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6). induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.

7). Bidang pajak daerah II, membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkiran, dan Sarang Burung Walet
- c. Sub Bidang Pajak reklame, dan Air Tanah.

8). Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

10. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

1). Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah.

2). Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.
 - d. Penyusunan, pegkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerima/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
 - e. Pengkoordinasian, perumusan, dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaraan penerimaan daerah.
 - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.
- 3). Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :
- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
 - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan penyitaan
 - c. sub Bidang Penyuluhan, dan keberatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4). Setiap Sub bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengendalian pajak daerah.

11. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

1). Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi

3). Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama
- b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak.
- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

4). Setiap sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

12. Unit Pelaksanaan Teknis

1). Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2). UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :

- a. UPT Kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar, dan
- b. UPT Kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3). Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan telah dikonsultasi secara tertulis kepada wakil pemerintah pusat.

13. Kelompok Jabatan Fungsional

1). Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.

2). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

3). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Pelalawan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

4). Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan perundang-undangan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pajak reklame telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2023.

Beberapa aspek seperti cara perhitungan pajak reklame, objek pajak reklame, Dasar pengenaan pajak, dan jumlah wajib pajak telah dilaksanakan secara konsisten sesuai teori. Hal ini menunjukkan bahwa BAPENDA Kabupaten Pelalawan telah menerapkan prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak dengan baik dan sesuai regulasi. Namun terdapat penambahan pada aspek mekanisme pemungutan, dimana dalam praktiknya terdapat prosedur tambahan seperti penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan pengajuan serta penandatanganan Surat Tugas oleh pejabat terkait. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian administrasi dalam teknis di lapangan untuk memastikan kelancaran proses pemungutan pajak dan peningkatan efektivitas pengawasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Mekanisme Pemungutan, BAPENDA Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemungutan pajak reklame yang saat ini dijalankan. Prosedur tambahan seperti STPD dan proses surat tugas hendaknya disederhanakan tanpa mengurangi akuntabilitas, agar proses lebih efisien dan tidak menimbulkan hambatan birokrasi.
2. Digitalisasi Proses Administrasi Pajak, disarankan BAPENDA mulai mengembangkan dan menerapkan sistem digital dalam pengelolaan pajak, termasuk pendaftaran objek pajak, penerbitan SKPD/STPD, hingga pembayaran. Hal ini akan meningkatkan transparansi, mempercepat layanan, dan memudahkan wajib pajak.
3. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Wajib Pajak, BAPENDA perlu terus melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan pajak reklame, termasuk tarif, objek pajak, dan kewajiban pembayaran. Hal ini penting untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi potensi pelanggaran atau kesalahpahaman.
4. Penguatan Pengawasan dan Penertiban, walaupun pengawasan sudah termasuk dalam teori dan praktik, perlu adanya intensifikasi kegiatan monitoring di lapangan terhadap reklame ilegal atau yang belum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar pajak. Penertiban secara tegas dan teratur dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan keadilan pajak.

5. Pelatihan dan Pengembangan SDM Internal, untuk menjaga konsistensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan pajak reklame, pegawai di lingkungan BAPENDA perlu mendapatkan pelatihan berkala terkait kebijakan perpajakan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Q.S. An-Nisa: 29.

Q.S. At-Taubah Ayat : 29

HR.Abu Dawud,Ahmad, Tentang pemungutan yang zalim

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.

Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Pelalawan: Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 11.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muljono, Djoko. (2010). *Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Abdul Halim. (2004:94) . *Akuntansi Keuangan Daerah ,UPP.AMP.YKPN*. Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). *Kontribusi*. Diambil dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontribusi>

Jotopurnomo dan mangoting, 2013

Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

Azhari, Samudra. (2016:216). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. PT Rajagrafindo Persada Rajawali Pers.



LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/71785
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset/Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2025 Tanggal 16 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **ALFYN MAHENDRA NAWAWI**
- 2. NIM/ KTP : 02270613611
- 3. Program Studi : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
- 4. Jenjang : DIII
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **MEKANISME PEMUNGUTAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PELALAWAN**
- 7. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Pelalawan
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
- 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU